

**KINERJA ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN  
DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2009-2012**

**SUCI MELIA IRAWAN**  
**0801132089**  
[ichy.alfred@gmail.com](mailto:ichy.alfred@gmail.com)  
**082170435555**

**PEMBIMBING : DRA. WAN ASRIDA, M.SI**

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Km.12.5 Simpang Panam, Pekanbaru 28293, Telp/Fax (0761)63277

**ABSTRACT**

With the purpose to identify and describe the performance of woman and their function as a member of the legislative, legislation, budget and control in the regional parliaments of Pekanbaru, also examine the factors for poor performance of woman in legislative. Obtained results which indicate that the performance of woman in legislative in carrying out the functions of legislation, budget and control in the regional parliaments of Pekanbaru in 2009-2012 still low.

Key words : Performance, legislative function.

## **LATAR BELAKANG**

Tidak dapat dipungkiri, bahwa selama ini terdapat kesalahpahaman terhadap aktivitas politik perempuan. Sebagian memandang bahwa keterlibatan perempuan dalam dunia politik dianggap tidak layak dan melanggar fitrah, seakan-akan politik bukanlah dunia perempuan. Sebaliknya, di sisi lain sebagian berpendapat bahwa justru perempuan harus berkiprah dan berperan aktif di segala bidang, sama dengan laki-laki tanpa pengecualian, termasuk aktif di bidang politik. Hanya saja, politik yang mereka maksud terbatas pada aspek kekuasaan legislasi saja.

Peranan perempuan dalam menjalankan fungsinya di badan legislatif belum mendapatkan tempat yang strategis, dimana kedudukan laki-laki yang lebih mendominasi dan dalam menentukan kebijakan publik, biasanya perempuan hanya menjadi peserta dan penikmat kebijakan saja.

Dengan berkembangnya gagasan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, maka badan Legislatif sebagai perwujudan perwakilan rakyat menjadi badan yang berhak menjalankan kedaulatan itu. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu lembaga atau badan perwakilan rakyat di daerah yang mencerminkan struktur dan sistem pemerintahan demokratis di daerah.

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota yang ada di Indonesia, pada Pemilu 2009 terdapat perempuan-perempuan dengan perolehan jumlah sebanyak 7 (tujuh) Kursi dari 45 (empat puluh lima) kursi yang ada. Perempuan-perempuan ini memiliki peran dan fungsi sebagai wakil rakyat di lembaga legislatif Daerah Periode 2009-2014 di Kota Pekanbaru sebagaimana tugas, fungsi dan wewenang para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada umumnya.

## **TEORI**

Menurut Henry (1999:327) kinerja adalah tingkat sejauh mana para pegawai mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan, penilaian kinerja adalah proses yang mengukur kinerja personil/ penilaian kinerja pada umumnya menyangkut baik aspek kuantitatif dari pelaksanaan pekerjaan. Penilaian merupakan salah satu fungsi mendasar personalia kadang-kadang juga disebut *revie* kinerja, evaluasi pegawai atau ranting personalian.

Dan menurut Kartono (1992:32) kinerja adalah kemampuan dalam menjalankan tugas dan pencapaian standar keberhasilan yang telah ditetapkan oleh instansi kepada pegawai sesuai dengan job yang diberikan kepada masing-masing pegawai. Kaitan erat lainnya mengenai kinerja adalah prestasi kerja, seorang pegawai yang memiliki kinerja yang baik akan memiliki prestasi kerja yang baik pula, sebaliknya prestasi kerja yang jelek disebabkan oleh kinerja pegawai yang buruk.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah :

1. Kesetiaan, penilaian menilai kesetiaan karyawan terhadap karyawan, jabatan, organisasi. Kesetiaan ini dicerminkan oleh kesediaan karyawan menjaga dan membela organisasi didalam maupun diluar karyawan dari rongrongan orang yang tidak bertanggung jawab.
2. Prestasi kerja, penilaian hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang dapt dihasilkan karyawan tersebut dari uraian karyawan.

3. Kejujuran, penilaian kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugas memenuhi perjanjian baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap orang lain kepada bawahannya.
4. Kedisiplinan, kedisiplinan karyawan dalam mematuhi peraturan-peraturan yang ada dan mengerjakannya sesuai dengan instruksi yang diberikan kepadanya.
5. Kreatifitas, penilai menilai kemampuan karyawan dalam mengembangkan kreatifitasnya untuk menyelesaikan karyawannya, sehingga bekerja lebih berdaya guna dan hasil guna.
6. Kerjasama, penilaian menilai kesediaan karyawan itu berpartisipasi dan bekerjasama dengna karyawan lainnya vertikal dan horizontal didalam maupun diluar karyawanan sehingga hasil karyawanan akan semakin baik.
7. Kepemimpinan, penilaian kemampuan memimpin, berpengaruh, mempunyai pribadi yang kuat, dihormati, berwibawa dan dapat memotivasi orang lain atau bawahannya.
8. Kepribadian, penilaian menilai sikap prilaku, kesopanan, periang, disukai, memberi kesan menyenangkan, memperlihatkan sikap yang baik dan penampilan simpatik serta wajar dari karyawan tersebut.
9. Prakarsa, penilaian menilai kemampuan berpikir yang orisinal dan berdasarkan inisiatif sendiri untuk menganalisa, menilai mencipta, memberikan alasan, mendapatkan dan membuat keputusan penyelesaian masalah yang dihadapi.
10. Kecakapan, penilaian menilai kecakapan karyawan dalam menyatukan dan menyelaraskan bermacam-macam elemen yang semuanya terlibat dalam penyusunan kebijaksanaan dan didalam situasi manajemen.
11. Tanggung jawab, penilaian kesediaan karyawan dalam mempertanggungjawab kebijaksanaannya, sarana dna prasarana yang digunakan, prilaku serta hasil kerja dari bawahannya (Hasibuan, 2002:106).

### **KONSEP OPERASIONAL**

Untuk memudahkan penganalisaan dan tidak mengaburkan konsep, agar tujuan dapat tercapai maka penulis merasa perlu membatasi dan mengoperasionalkan konsep-konsep sebagai berikut:

1. Istilah perempuan dalam tulisan ini sama pengertiannya dengan wanita, yaitu untuk menyebutkan satu jenis kelamin selain laki-laki/pria.
2. Legislatif didefinisikan sebagai lembaga yang “*legilate*” atau membuat Undang-undang. Anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat, maka dari ini badan ini sering dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Anggota Legislatif Perempuan adalah orang yang menjadi wakil rakyat yang berperan untuk menjalankan fungsi pemerintahan.
4. Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga yang berkedudukan di Ibukota Pekanbaru.

5. Kinerja adalah kemampuan hasil kerja yang telah dicapai dalam menjalankan tugas oleh lembaga DPRD sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab yang dimilikinya dapat digunakan dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki fungsi yaitu:
  - Legislasi, yaitu legislasi yang merupakan fungsi DPRD untuk membentuk peraturan daerah bersama dengan pemerintah daerah.
  - Anggaran, yaitu fungsi DPRD bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD yang di dalamnya termasuk anggaran untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
  - Pengawasan, yaitu fungsi DPRD untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, dan keputusan serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Paradigma kualitatif menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang kompleks dan rinci (Sugiyono, 2007:23).

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru, sebagai Ibukota Propinsi Riau yang merupakan pusat informasi dan aktifitas penyelenggaraan pemerintah atau politik di Riau. Penelitian ini memfokuskan pada perempuan tertentu, yakni yang terlibat dalam aktivitas politik khususnya pada lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Deskriptif, yang dapat di artikan sebagai proses pemecahan masalah yang di selidiki dengan melukiskan atau mendeskripsikan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya.

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Data primer sendiri adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari anggota DPRD. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, antara lain: publikasi ilmiah, literatur, data statistik, sumber elektronik, dan lain-lain.

Adapun teknik pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam untuk memperoleh data dan informasi yang mendalam. Serta dokumentasi dengan memanfaatkan dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dengan masalah yang berbentuk laporan, kliping, dokumen dan foto.

## **PEMBAHASAN**

1. Dalam tiga tahun menjalankan kinerja anggota legislatif perempuan kurang berhasil menjalankan fungsinya. Dapat dilihat dari belum adanya perda inisiatif yang berhasil dibuat guna merepon kepentingan perempuan.
2. Demikian dengan fungsi anggaran dimiliki dewan belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. APBD belum berpihak pada perempuan yang tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan lebih bnyak membutuhkan biaya

untuk bidang-bidang esensial. Seperti dalam bidang kesehatan dan untuk mengejar ketertinggalan perempuan yang selama ini terabaikan.

3. Menjalankan fungsi pengawasan tentunya terlebih dahulu melahirkan peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Sehingga, perda yang dihasilkan tidak ada yang berkaitan dengan perempuan, pengawasan sejauh ini masih terhadap SKPD.

4. Belum maksimalnya kinerja anggota legislatif perempuan juga tidak lepas dari tingkat pendidikan, pengalaman di bidang politik, beban ganda perempuan dan kurang percaya diri. Sehingga dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang memiliki potensi. Perlunya rekrutmen yang jelas dari partai politik juga sangat menentukan kualitas para calon legislatif, yang berfungsi sebagai representasi rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Alwis, 2002, **Prosedur Pelaksanaan Pengorganisasian dalam Suatu Perusahaan**, PT. Rineka, Jakarta
- Budiono, B, 1999, **Pelayanan Publik**, Yayasan Kawul Indonesia, Jakarta
- Basuki, Johanes, 2002, **Pelayanan Publik**, LAN, Jakarta, 2002
- Dwiyanto, 2002, **Pelayanan Pemerintah Daerah di Era Otonomi**, CV. Fajar Agung, Jakarta
- Haris Syamsudin (ED), 2002, **Desentralisasi Demokrasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah**, AIPI, Jakarta
- Irmansyah, R. Mamat, 1987, **Manajemen Publik**, Armico. Bandung
- Kumorotomo, 200, **Masalah Pemerintahan di Daerah**, Bina Aksara, Jakarta
- Moenir, 2002, **Pelaksanaan Pelayanan bagi Masyarakat**, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Moenir, 1998, **Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia**, Cetakan III, Bumi Aksara, Jakarta,
- Poltak, Lijan 2007, **Reformasi Pelayanan Publik**, Bumi Aksara, Jakarta
- Pramuji, S., 1984, **Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Sistem Administrasi Negara**, Alumni Bandung
- Purwodarminto, 1996, **Pelaksanaan Asas Desentralisasi dan otonomi Daerah di Indonesia**, LP3ES. Jakarta,
- Syafrudin, Ateng, 1999, **Pengantar Koordinasi Pemerintahan di Daerah**, Tarsito Bandung
- Thoha, Miftah, 1996, **Birokrasi dan Politik di Indonesia**, Rajawali Press, Jakarta
- Tjokrowinoto, Moeljarto, dkk (ed) Saiful Arif, 2001, **Birokrasi Dalam Polemik**, Yogyakarta
- Wajong. J, 2003, **Pola Pembangunan masyarakat di Daerah**, Jambatan, Jakarta.
- Yulk, Garry, (Alih Bahasa Yusuf Udayana), 1998, **Kepemimpinan dalam Organisasi**, Prenhallindo, Jakarta.

### B. Peraturan dan Perundang-Undangan

- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 **tentang Pemerintah Daerah**
- Keputusan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Nomor 81 tahun 1993 **tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum di Indonesia**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 **tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

